

**MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM  
MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL  
DI KOTA BEKASI**  
**(Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak  
Jalanan)**

**Bagus Ibnu Santoso<sup>1</sup>, Eka Yulyana<sup>2</sup>, Lina Aryani<sup>3</sup>**

*Universitas Singaperbangsa, Karawang<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: bagusibnu@gmail.com

**ABSTRAK**

*Kehidupan yang layak dan kesejahteraan sosial pada dasarnya berhak untuk dimiliki oleh setiap individu. Namun pada kenyataannya, terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama di Kota Bekasi. Itulah salah satu penyebab adanya Tuna Sosial di Kota Bekasi. Keberadaan Tuna Sosial tersebut, menimbulkan dampak dan polemik. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui manajemen strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi dengan indikator Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan jenis triangulasi teknik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa formulasi strategi Dinas Sosial Kota Bekasi berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, Implementasi strategi dari Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu dengan menjalankan standar pelayanan minimal berupa rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di luar panti sosial, dan Evaluasi strategi dalam menangani Tuna Sosial yaitu perbaikan dalam melakukan rehabilitasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Tuna Sosial.*

**Kata Kunci:** *Manajemen, Strategi, Tuna Sosial*

**ABSTRACT**

*A decent life and social welfare basically have the right to be owned by every individual. But in reality, there are people who are below the poverty line, especially in Bekasi City. That is one of the causes of the existence of Social Tuna in Bekasi City. The existence of the Social Tuna causes impacts and polemics. This study aims to determine the strategic management of the Bekasi City Social Service in dealing with the problem of Social Tuna in Bekasi City. This study uses strategic management theory with indicators of Strategy Formulation, Strategy*

*Implementation and Strategy Evaluation. This research method uses a case study with a qualitative approach. Observations, interviews, and documentation are the data collection techniques used. The data validity test technique used is a triangulation technique with the type of triangulation technique. The results showed that the formulation of the strategy of the Bekasi City Social Service was based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 9 of 2018 concerning Basic Service Technical Standards on Minimum Service Standards in the Social Sector in Provinces and Regency/City Areas, the implementation of strategies from the Bekasi City Social Service, namely by carrying out minimum service standards in the form of basic social rehabilitation for socially disabled outside social institutions, and evaluation the strategy in dealing with the Socially Impaired is improvement in doing rehabilitation and providing trainings for the Socially Impaired.*

**Keywords:** *Management, Strategy, Social Tuna*

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan Sosial dan kehidupan yang layak merupakan hal yang setiap individu berhak untuk memilikinya. Namun pada kenyataannya, kemiskinan masih menjadi ancaman bagi setiap daerah, khususnya Kota Bekasi. Kemiskinan menjadi faktor utama dari keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori Tuna Sosial. Kehadiran Tuna Sosial menunjukkan bahwa Kota Bekasi tidak dapat melaksanakan dengan baik kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak bagi sebagian individu. Data mengenai kemiskinan di Kota Bekasi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2019-2020. Adapun data mengenai kemiskinan yang terjadi di Kota Bekasi yaitu:

**Tabel. 1 Angka Kemiskinan di Kota Bekasi**

Kemiskinan	Tahun	
	2019	2020

Penduduk (000) Jiwa	Miskin	113,65	134,01
Persentase Penduduk Miskin		3.81	4.38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2021.

Selain kemiskinan, menjadi penyanggah dari Ibukota DKI Jakarta, Kaum Urban, dan wabah virus Corona yang terjadi di tahun 2020 juga menjadi faktor-faktor dari hadirnya Tuna Sosial di Kota Bekasi.

Keberadaan Pemerintah Daerah Kota Bekasi diperlukan dalam menangani permasalahan sosial tersebut, mengingat keberadaan Tuna Sosial di Kota Bekasi selalu ada dan terlihat jelas di jalanan maupun di tempat umum lainnya seperti fasilitas umum, angkutan kendaraan umum, dan lain sebagainya. Keberadaan Tuna Sosial tersebut juga memberikan dampak terhadap Kota Bekasi yaitu masyarakat Kota Bekasi merasa resah dari keberadaan Tuna Sosial tersebut; Keindahan Kota Bekasi menjadi

terganggu; serta kemandirian masyarakat yang beragam. Dalam hal ini, apabila mengacu pada teori Manajemen Strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David, formulasi strategi yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial harus diperhatikan dengan baik. Dengan memperhatikan beberapa dimensinya yaitu dari sisi visi dan misi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, kesempatan dan Ancaman yang akan dihadapi, serta Strategi yang dipilih guna mengatasi permasalahan Tuna Sosial yang terdapat di Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaan penanganan Tuna Sosial juga terkendala oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran, tidak lengkapnya sarana dan prasarana, dan data serta informasi mengenai PMKS (Tuna Sosial) yang belum lengkap. Keterbatasan inilah yang harus diperhatikan dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi. Karena apabila dilihat dari teori Manajemen Strategi menurut Fred R. David, alokasi sumber daya sangat berperan dalam keberlangsungan dari implementasi strategi. Jadi alokasi sumber daya dalam menangani permasalahan Tuna Sosial yang ada di Kota Bekasi harus diperhatikan dengan baik, guna terlaksananya implementasi strategi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi.

Berdasarkan penjelasan latarbelakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan berupa terdapat peningkatan kemiskinan di Kota Bekasi pada Tahun 2019-2020, Keberadaan Tuna Sosial menyebabkan beberapa permasalahan di Kota Bekasi, dan keterbatasan sumber daya dalam melakukan penanganan permasalahan sosial di Kota Bekasi. Penelitian ini dibatasi pada Manajemen Strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam Menangani Permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi (studi pada penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Strategi**

Dalam mencapai suatu tujuan, strategi sangat diperlukan. Strategi yang digunakan di dalam mencapai tujuan memiliki karakteristik, memiliki unsur-unsur tertentu dan dengan keberadaan strategi diharapkan memberikan keefektifan dan keefisienan terhadap hal yang akan dicapai. Menurut David, Strategi adalah tindakan potensial yang dalam pencapaian tujuan membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar (David, 2017:11).

Menurut Alfred Chandler, Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut (Nilasari, 2014:3). Sedangkan menurut Suryono, Strategi memiliki 3

hal utama. Adapun 3 hal utamanya yaitu Tujuan, Sarana, dan Cara (Suryono, 2015:171).

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa strategi adalah cara dalam penyusunan rencana dan penentuan proses guna mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan beberapa tahapan dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap permasalahan, menentukan metode dalam penyelesaian permasalahan dan menerapkan metode yang dipilih. Dalam hal ini, rencana yang dimaksud meliputi Kebijakan, Tujuan, dan implementasi yang harus dilakukan.

#### **Definisi Manajemen Strategi**

Fred R. David menjelaskan bahwa Manajemen Strategis ialah suatu seni dan ilmu untuk memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi, dengan itu maka organisasi bisa mencapai tujuan organisasi (David, 2017:3). Sedangkan menurut Simorangkir, Manajemen Strategik memiliki pengertian yaitu suatu seni dan ilmu pembuatan (Formulating), penerapan (Implementing), dan evaluasi (Evaluating) Keputusan-keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang (Ahmad, 2020:3).

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa manajemen strategi memiliki pengertian yaitu ilmu dalam memformulasikan suatu strategi,

mengimplementasikan suatu strategi yang telah dirumuskan, dan mengevaluasi suatu kegiatan dari apa yang menjadi tujuan dalam menarapkan suatu strategi.

#### **Definisi Tuna Sosial**

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, menjelaskan ada beberapa jenis dari Tuna Sosial yaitu seperti Gelandangan dan Pengemis, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dan lain sebagainya. Gambaran lebih merinci tentang gelandangan adalah seseorang/kelompok yang tidak mengikuti norma-norma umum masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan serta tempat tinggal yang tetap. Pengemis adalah orang yang mencari uang dari orang lain dengan cara meminta di tempat umum. Sedangkan Anak Jalanan, yaitu anak usia sekolah yang menghabiskan waktunya di tempat umum untuk mencari nafkah.

#### **METODE**

Pada penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini berupaya memahami Manajemen Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi dalam Menangani Permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi (Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan).

Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis observasi dan wawancara yang digunakan yaitu observasi terstruktur atau tersamar dan wawancara terstruktur. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana dalam menentukan informan terdapat beberapa pertimbangan agar informasi yang didapatkan lebih lengkap dan terpercaya.

Teknik triangulasi dengan jenis triangulasi teknik menjadi teknik uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti. Rustanto menjelaskan bahwa Triangulasi Teknik menguji tingkat kepercayaan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda (Rustanto, 2015:67). Seperti data yang dihasilkan dari observasi, dicek dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan atau hal lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Formulasi Kebijakan**

#### **Visi Misi**

Dalam hal ini terdapat upaya dari Dinas Sosial Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan Tuna Sosial yang dapat dilihat dari Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas tersebut. Dinas Sosial Kota Bekasi ingin menjadi yang terdepan dalam pelayanan menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan dengan cara

meningkatkan upaya pemberdayaan, rehabilitasi dan lain sebagainya, dan serta meningkatkan peran aktif sumber kesejahteraan sosial di dalam pembangunan atau penanganan kesejahteraan sosial. Hal tersebut juga tercantum di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yang kemudian visi dan misi tersebut dijadikan dasar dalam menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bekasi.

### **Kekuatan dan Kelemahan Internal Dinas Sosial Kota Bekasi**

Menurut narasumber "H", kekuatan dari Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial yaitu dengan melakukan kerjasama kepada stakeholder seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kelurahan, Kecamatan, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Orsos (Organisasi Sosial) dan PUSKESOS/SLRT(Sistem Layanan Rujukan Terpadu).

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan Tuna Sosial yaitu dari segi anggaran yang memberikan efek kepada keberadaan Sumber Daya Manusia, dan sarana/prasarana. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia seperti Psikiater, Psikolog atau dengan kata lain tenaga ahli yang berkompeten dalam mengatasi permasalahan sosial

tersebut masih kurang. Ini yang menjadikan kurang maksimalnya penanganan dari Dinas Sosial Kota Bekasi terhadap Tuna Sosial jenis Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.

### **Kesempatan dan Ancaman Dinas Sosial Kota Bekasi**

Dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan permasalahan sosial, Dinas Sosial memiliki ancaman dalam melakukan tugasnya. Menurut narasumber “E”, dalam melakukan penjangkaran kepada Tuna Sosial khususnya Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, tidak menutup kemungkinan terjadi penolakan-penolakan, perlawanan, hingga tindakan yang mengancam keselamatan para petugas dilapangan. Seperti dalam menjangkari Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, petugas di lapangan sering mendapatkan pukulan baik yang disengaja atau tidak, terjadinya aksi kejar-mengejar antara petugas dan Tuna Sosial, serta ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para Tuna Sosial tersebut.

Hal lainnya juga disampaikan oleh narasumber “D”, bahwa dalam proses menyerahkan Anak Jalanan yang terjangkari, kemudian telah direhabilitasi dan tidak memiliki keluarga dan diserahkan kepada yayasan sosial, tidak jarang yayasan sosial yang merasa keberatan atau butuh waktu untuk mempertimbangkan dalam menerima Anak Jalanan tersebut. Hal ini dikarenakan Anak Jalanan terkadang memiliki karakter

karakter yang terbiasa bebas (liar) sehingga apabila di yayasan tersebut bisa menyebabkan dan menimbulkan masalah baru atau bahkan bisa lari/kabur dari yayasan sosial tersebut.

### **Strategi Dinas Sosial Kota Bekasi**

Strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk jangka pendek dalam menangani permasalahan Tuna Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial yang mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Sosial tersebut, Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial untuk para Tuna Sosial yang dilakukan di tingkat keluarga, di Rumah Singgah, atau diserahkan kepada pihak daerah Provinsi.

Menurut narasumber “E” dan “D”, Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki Strategi jangka panjang dalam menangani permasalahan Tuna Sosial tersebut yaitu dengan memberikan pelatihan kepada para Tuna Sosial tersebut yang terjangkari pada saat dilakukan penjangkaran. Menurut narasumber “H”, Strategi jangka panjang lainnya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu dengan melakukan kerja sama kepada Balai Latihan Kerja Kota Bekasi, dan yayasan-yayasan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial seperti Pangudi

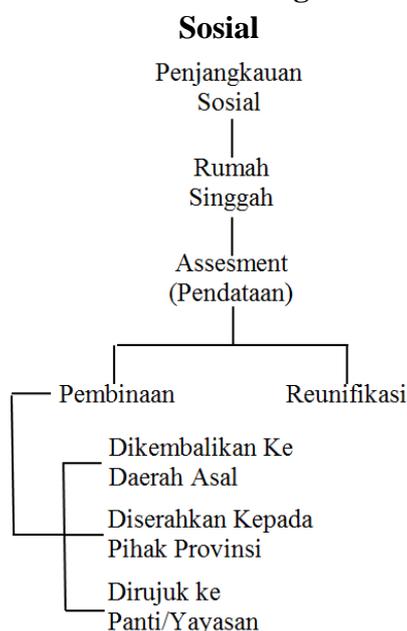
Luhur untuk memfasilitasi pelatihan dan pembinaan mental kepada para Tuna Sosial tersebut, dan hal itu dilakukan setelah mereka melaksanakan rehabilitasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi. Hal ini ditujukan agar Tuna Sosial tersebut bisa hidup mandiri setelah melalui masa Rehabilitasi, Pembinaan dan Pelatihan.

### Implementasi Strategi Menetapkan Kebijakan

Dalam upaya mengatasi permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi berpedoman kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan Menteri Sosial tersebut, daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi atau menangani permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis memiliki Standar Pelayanan Minimal berupa Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial.

Adapun alur mengenai penanganan Dinas Sosial Kota Bekasi terhadap Tuna Sosial yang terjaring saat dilakukan penjangkauan yaitu sebagai berikut:

**Gambar. 1 Alur Penanganan Tuna Sosial**



Sumber: Wawancara Dinas Sosial Kota Bekasi, 2021.

Berdasarkan Gambar 1, Penjangkauan Tuna Sosial dilakukan melalui kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Satpol PP yang dilakukan dengan cara bergerak menyusuri jalan-jalan atau fasilitas umum yang berada di wilayah Kota Bekasi dan menjaring atau melakukan penjangkauan kepada para Tuna Sosial yang keberadaannya mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya, Tuna Sosial yang terjaring akan dibawa ke Rumah Singgah milik Pemerintah Kota Bekasi yang berada di Padurenan, Mustika Jaya. Berikut gambar Rumah Singgah milik Pemerintah Kota Bekasi yang berada di Padurenan, Mustika Jaya.

## Gambar. 2 Rumah Singgah Kota Bekasi



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Di dalam Rumah Singgah, para Tuna Sosial tersebut dilakukan Assesment atau pendataan. Pendataan ini, melibatkan beberapa stakeholder yaitu diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan. Dalam melakukan Assesment (Pendataan), apabila Tuna Sosial tersebut memiliki keluarga, maka akan dilakukan pengembalian kepada pihak keluarga (Reunifikasi). Namun apabila Tuna Sosial tersebut sudah tidak memiliki keluarga, maka akan dilakukan pembinaan sementara selama 7 hari di Rumah Singgah milik Pemerintah Kota Bekasi dan akan dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk langkah atau tindakan lebih lanjut.

Dalam melakukan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Bekasi juga bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan, Pekerja Harian Lepas yang berada di Rumah Singgah, dan PusKesMas. Rehabilitasi yang dilakukan di Rumah Singgah kepada para Tuna Sosial khususnya Anak

Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis hanya sebatas memberikan fasilitas berupa makanan, minuman, tempat tidur, dan bimbingan secara teori yang meliputi bimbingan motivasi, bimbingan mental spiritual dan pengasuhan serta perawatan. Dinas Kesehatan dan PusKesMas dibutuhkan untuk memantau dan membantu para Tuna Sosial yang membutuhkan perawatan medis. Dinas Sosial Kota Bekasi juga dibantu oleh Pekerja Harian Lepas yang berada di Rumah Singgah dalam melakukan pelaksanaan penanganan kepada Tuna Sosial tersebut.

Selama 7 hari masa rehabilitasi di dalam Rumah Singgah, Dinas Sosial Kota Bekasi melakukan penelusuran terhadap Tuna Sosial yang tidak memiliki keluarga. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Bekasi melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertujuan untuk mengetahui asal tempat tinggal para Tuna Sosial tersebut. Seperti contoh, untuk mengidentifikasi asal tempat tinggal Tuna Sosial tersebut, dilakukan pengecekan retina mata guna mengetahui biodata dan asal tempat tinggal Tuna Sosial tersebut.

Tuna Sosial yang teridentifikasi asal tempat tinggalnya, maka akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial tempat tinggal asalnya untuk proses pemulangan. Gelandangan dan Pengemis yang tidak dapat teridentifikasi tempat asalnya, maka akan dilakukan penyerahan kepada pihak Provinsi untuk penanganan lebih

lanjut. Untuk Anak Jalanan yang tidak teridentifikasi tempat asalnya, maka akan diserahkan kepada Organisasi Sosial (Yayasan Anak) yang terdapat di Kota Bekasi. Yayasan Anak yang terdapat di Kota Bekasi untuk saat ini berjumlah 276 Yayasan/Panti.

### **Alokasi Sumber Daya**

Sumber pendanaan dan sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan permasalahan Tuna Sosial terdapat di dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 99 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Tuna Sosial tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sumbangan Masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha, dan Sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Sumber Daya Manusia sebagai Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat dan Relawan Sosial.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial yaitu terdapat Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 250 orang dan Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan sebanyak 12 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kota Bekasi melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder, diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kelurahan, Kecamatan, Organisasi Sosial dan PUSKESOS/ SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu). Untuk Organisasi Sosial (yayasan) yang menangani permasalahan Anak Jalanan, terdapat sebanyak 276 yayasan. Namun untuk Organisasi Sosial (yayasan) yang menangani permasalahan Gelandangan dan Pengemis, belum terdapat di Kota Bekasi. Selain itu, total dari PusKesSos/SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang ada di Kota Bekasi, baru terdapat di 9 Kelurahan.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi adalah berupa Rumah Singgah. Rumah Singgah milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi terdapat di Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Rumah Singgah tersebut memiliki luas tanah sekitar 2000 meter persegi yang di dalamnya terdapat fasilitas berupa Kamar-Kamar yang menampung para PMKS, Musholla, Fasilitas olahraga, ruang keterampilan dan kantor.

### **Evaluasi**

Evaluasi merupakan tahap final dari manajemen strategi. Dengan adanya evaluasi, diharapkan adanya perbaikan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan selanjutnya.

Evaluasi bisa menjadi acuan apakah strategi sebelumnya bisa digunakan dimasa yang akan datang, apakah strategi sebelumnya bisa digunakan namun membutuhkan beberapa modifikasi, dan apakah strategi tersebut sudah tidak bisa digunakan karena sudah tidak relevan dengan keadaan dan kondisi dikemudian hari. Dinas Sosial Kota Bekasi melakukan evaluasi secara berkala pertriwulan. Hasil dari evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan dilangkah selanjutnya.

Dalam hal strategi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, Strategi penanganan Tuna Sosial melalui Rehabilitasi Sosial bisa dikatakan baik, walaupun ada beberapa perbaikan yang harus diperhatikan. Seperti, strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi tidak cukup sebatas Rehabilitasi Sosial. Strategi lain yang dibutuhkan kedepannya adalah berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk para Tuna Sosial khususnya Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Hal ini ditujukan agar setelah melakukan rehabilitasi dan pelatihan, para Tuna Sosial Tersebut dapat hidup mandiri. Pelatihan bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan stakeholder seperti Balai Latihan Kerja dan membuat regulasi agar para Tuna Sosial Tersebut bisa tinggal lebih lama di Rumah Singgah dan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tentunya hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran, sumber daya manusia yang dimiliki dan sarana dan prasarana yang

digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Manajemen Strategis dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi dilihat dari formulasi strategi, Dinas Sosial Kota Bekasi menjadikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai landasan dalam mengatasi permasalahan Tuna Sosial. Kekuatan berupa kerjasama dengan stakeholder lain dan kelemahan berupa terbatasnya anggaran yang memberikan efek terhadap sumber daya manusia juga menjadi pertimbangan di dalam memformulasikan strategi. Ancaman yang terdapat pada saat penjarangan serta penolakan-penolakan pada saat menyerahkan Anak Jalanan kepada pihak yayasan sosial juga menjadi pertimbangan di dalam memformulasikan strategi. Sehingga Dinas Sosial Kota Bekasi memilih rehabilitasi sosial dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi.

Dilihat dari Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal berupa Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial di luar panti sosial yang sesuai dengan strategi yang dimiliki oleh

Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan Tuna Sosial. Lalu mengenai alokasi sumber daya Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 99 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Evaluasi Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi di dalam menangani permasalahan Tuna Sosial yaitu dengan memperhatikan beberapa perbaikan terhadap rehabilitasi sosial yang sudah/ sedang berjalan dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Tuna Sosial di Kota Bekasi yang bertujuan untuk memberikan bekal hidup mandiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Makassar : Nas Media Pustaka.  
David, F.R. 2017. *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.

Nilasari, S. 2014. *Manajemen Strategi Itu Gampang*. Jakarta : Dunia Cerdas.

Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Suryono, Agus. 2015. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : Universitas Brawijaya Press.

#### **Dokumen Resmi:**

Data Penduduk Miskin Di Kota Bekasi (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Wali Kota Bekasi No. 99 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.